

PENTINGNYA PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BAGI ANAK USIA DINI

Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Si.

Pendahuluan

Pendidikan bertujuan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas otaknya dan trampil dalam melaksanakan tugas, namun diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti, bersumber dari hati nurani sehingga menghasilkan warga negara *excellent*. Oleh karena itu pendidikan tidak semata-mata mentrasfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan transfer nilai budi pekerti bersifat universal, diharapkan peserta didik dapat menghargai kehidupan orang lain tercermin dalam tingkah laku serta aktualisasi diri, semenjak usia dini hingga kelak dewasa menjadi warga bangsa.

Dalam kenyataannya manusia Indonesia (khususnya anak-anak remaja) di saat ini, kurang memperhatikan budi pekerti yang tercermin dari perilaku tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti terjadi tawuran remaja, kurang menghormati orang tua, kurang mentaati norma-norma keluarga, hidup tidak disiplin. Terlebih pada masa globalisasi manusia Indonesia cenderung berperilaku keras, cepat, akseleratif dalam menyelesaikan sesuatu, dan budaya instan. Manusia dipaksa hidup seperti robot, selalu berada pada persaingan tinggi dengan sesamanya, hidup bagaikan roda berputar cepat, yang membuat manusia mengalami disorientasi meninggalkan norma-norma universal, menggunakan konsep *Machiavelli*, mementingkan diri sendiri dan **tidak memiliki budi pekerti yang luhur**, tidak menghargai, mengasihi dan mencitai sesamanya (Haedar Nashir, 2007: 1).

Hidup semakin sulit, KKN menggurita, kriminalitas tinggi, dan tantangan ke depan yang berhubungan dengan pergeseran nilai semakin berat. Hidup di era transisi dan krisis multidimensional, hidup penuh berbagai kejanggalan di luar skenario yang diharapkan. Para birokrat bersama-sama pengusaha, dan eliti-eliti politik merampok uang rakyat, dan birokrasi telah menjadi seperti keranjang sampah. Pada saat yang sama bangsa-bangsa melakukan tindakan sinergis untuk kemajuan dan kejayaan negara bangsanya (*nation state*) sendiri-sendiri, namun bangsa Indonesia justru melakukan tindakan yang sebaliknya. Oleh karena itu sangat penting artinya **pendidikan budi**

pekerti agar peran pendidikan sebagai *habitus* yang dapat merubah perilaku peserta didik menjadi manusia ideal dengan parameter memiliki sikap cinta tanah air, bertanggung jawab, cerdas, mampu memahami segala persoalan bangsa dan mengelolanya dengan arif.

Dengan diberikannya pendidikan **budi pekerti bagi anak usia dini** diharapkan dapat merubah perilaku anak, sehingga peserta didik jika sudah dewasa lebih bertanggung jawab dan menghargai sesamanya dan mampu menghadapi tantangan jaman yang cepat berubah. Disinilah pentingnya **nilai-nilai budi pekerti** yang berfungsi sebagai media transformasi manusia Indonesia agar lebih baik, memiliki keunggulan dan kecerdasan di berbagai bidang; baik kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestetika, kecerdasan logis, musikal, linguistik, (Habibah, 2007: 1). Peran orang tua hanya sebatas memberi hal terbaik sesuai dengan jiwa jaman yang sedang dihadapi saat ini, agar kelak peserta didik (anak-anak usia dini) bagaikan anak panah lepas dari busurnya menentang, mengatasi permasalahannya sendiri, namun memiliki **keunggulan budi pekerti** yang baik dan luhur.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menurut Slamet Suyanto dalam makalahnya “*Prinsip-prinsip Pembelajaran Anak usia dini*” mengatakan bahwa PAUD merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; Pendidikan anak usia dini, Psikologi perkembangan anak, Biologi perkembangan, *Neoroscience*, Pendidikan jasmani, Pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang studi termasuk **pendidikan budi pekerti** (Slamat Suyanto, 2006: 1). Sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar dalam PAUD antara lain; *Appropriate* yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau *integrated*, bermakna, *long life skills* dan fleksibel

Anak usia dini mempunyai batasan dan pengertian beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak usia dini sering disamakan dengan manusia dewasa dalam bentuk mini, masih polos dan belum mampu berfikir luas. Akibatnya anak usia dini sering diperlakukan sebagai orang dewasa kecil. Namun dalam perkembangan kemudian, ternyata anak usia dini berbeda dengan orang

dewasa, sehingga diperlukan pendidikan secara khusus bagi anak usia dini sesuai dengan pertumbuhan fisik, emosional, kejiwaan dan **budi pekertinya** (Sofia Hartati, 2005: 7).

Anak usia dini sedang dalam pertumbuhan baik fisik dan mentalnya. Pertumbuhan saraf otaknya dimulai sejak dalam kandungan, dan ketika lahir sel saraf otak terus berkembang. Teori mengatakan, sampai usia 4 tahun 50% kecerdasan telah tercapai, dan 80% kecerdasan tercapai pada usia 8 tahun (Slamet Suyanto, 2005: 7).

Anak usia dini mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, **budi pekerti**, dan moralnya yang bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu usia dini disebut sebagai *golden age* (usia 0-8 tahun). Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan **berbudi pekerti luhur** (bermoral baik) pendidikan harus dimulai sejak usia dini.

Dalam usaha mentransfer nilai-nilai budi pekerti dapat digunakan **pendekatan dan metode** pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak usia dini. Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan **budi pekerti** dapat digunakan pendekatan **indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru**. Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi kondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi kelas, dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran **budi pekerti** (Sri Rumini, 1995: 19-20).

Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. Sedang pendekatan klasifikasi nilai, dengan cara penalaran dan ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih. Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku budi pekerti anak usia dini (Ambarwati, 2007: 1).

Sedang dalam mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti dapat digunakan metode bercerita (mendongeng), baik secara langsung, menggunakan ilustrasi, menggunakan papan planel, media boneka, Audio visual, Sosio drama. Metode bercerita khususnya menggunakan “dongeng” sangatlah menarik karena alur cerita, tujuan cerita, puncak

cerita dan akhir cerita dapat direncanakan sehingga tujuan pembelajaran budi pekerti lebih terarah dan terfokus untuk membentuk budi pekerti yang baik. Metode lain yang bisa digunakan antara lain; metode karya wisata, bermain yang berkaitan dengan menggunakan media seni rupa, seni musik sekaligus sebagai sarana untuk dapat membentuk perkembangan emosi dan kepribadian yang bermuatan budi pekerti. Jadi pendidikan budi pekerti harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan terfokus untuk membentuk warga negara yang baik

Budi pekerti bersumber dari hati nurani dan moral

Budi pekerti pada hakekatnya adalah hasil perbuatan tingkah laku manusia yang baik, luhur, normatif bersumber dari hati nurani manusia terdalam. Hasil perbuatan budi pekerti bersifat universal untuk menghormati orang tua, sesamanya yang menghasilkan tingkahlaku untuk membuat kehidupan dalam keluarga, masyarakat menjadi semakin harmonis dan menghargai kehidupan kemanusiaan bersumber dari moral manusia. **Budi Pekerti** lebih menonjolkan hasil olah budi yang diaktualisasikan dalam tingkah laku lahiriah, sedang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah “*Subasito*” yang lebih menekankan pada perbuatan lahiriah terhadap orang lebih tua sebagai wujud penghormatan. Jadi budi pekerti semacam aturan normatif tidak tertulis, ada dalam masyarakat dan dipelihara untuk penghormatan terhadap orang tua dan penghargaan terhadap sesama manusia.

Sedang moral berasal dari bahasa latin *mores*, yang artinya adat istiadat, kebiasaan atau cara hidup. Kata *mores* mempunyai sinonim *mos*, *moris*, *manner* *mores* atau *manners*, *morals*. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib hati nurani yang membimbing tingkahlaku batin dalam hidup. Kata moral sama dengan istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yaitu suatu kebiasaan adat istiadat. Secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik dan buruk, yang diterima umum tentang sikap dan perbuatan. Pada hakekatnya moral adalah ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sedang etika lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan pada suatu profesi (Budi Istanto, 2007; 4). Namun ada pengertian lain etika mempelajari kebiasaan manusia yang telah disepakati bersama seperti; cara berpakaian, tatakrama. Dengan demikian keduanya

mempunyai pengertian yang sama yaitu kebiasaan yang harus dipatuhi (Hendrowibowo, 2007: 84).

Moral selalu mengacu pada baik buruk manusia, sehingga moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia. Norma moral dipakai sebagai tolok ukur segi kebaikan manusia. Menurut Magnis Suseno yang dikutip Hendrowibowo; moral adalah sikap hati yang terungkap dalam sikap lahiriah. Moralitas terjadi jika seseorang mengambil sikap yang baik, karena ia sadar akan tanggungjawabnya sebagai manusia. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik sesuai dengan nurani (Hendrowibowo, 2007: 85).

Pendidikan Budi pekerti

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203: 7). Sedang hakekat **budi pekerti** bersumber dari nurani dan moral, adalah norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam mensosialisasikan nilai **budi pekerti** perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan budi pekerti, dan seluruh masyarakat.

Pendidikan **budi pekerti** harus direncanakan secara matang oleh *stakeholders* , sebagai *think-tank*, baik para pakar **Pendidikan budi pekerti atau pakar moral** seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Pendidikan **budi pekerti** ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Keberhasilan pendidikan **budi pekerti** dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang memiliki budi pekerti luhur dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*).

Dalam mewujudkan kehidupan **berbudi pekerti luhur** bagi anak usia dini perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politis, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD) dan SD. Melalui lembaga pendidikan formal aspirasi masyarakat tentang **pendidikan budi pekerti** dapat disalurkan, dan nilai-nilai budi pekerti dapat diperjuangkan sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah khususnya Depdikbud. Input dari masyarakat kepada pemerintah akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya **pendidikan budi pekerti** bagi anak-anak usia dini yang didukung dana dari pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar **pendidikan budi pekerti** dimasukkan dalam muatan lokal pendidikan dan didanai oleh Pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan semakin merosotnya budi pekerti, terutama di kalangan anak muda (Kompas, 15 Maret 2007: D). Sementara secara **kultural** memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa yang berbasis nilai-nilai **budi pekerti** melalui penghormatan kepada orang tua dan bersumber dari nilai moral, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan, menjunjung nilai-nilai **budi pekerti**, disemaikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan dan masyarakat luas.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti diperlukan guru, guru harus bersedia bersinergis dengan orang tua anak didik untuk mewujudkan kehidupan budi pekerti yang baik dengan menggunakan konsep *gold three angle* yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi mengadakan R dan D (*research & development*) dalam bidang pendidikan budi pekerti yang telah diuji cobakan dan berhasil. Depdikbud termasuk Pejabat Kanwil Depdikbud memberi *good will* (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti. Penyandang dana bisa dari *grand* (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai budi pekerti sehingga pendidikan budi pekerti bisa berjalan dengan baik seperti harapan.

Hasil penelitian perguruan tinggi tentang **budi pekerti** diharapkan menambah alternatif pemerintah yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga

perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan pendidikan khususnya dalam memecahkan **persoalan budi pekerti anak usia dini**. Mereka bisa bersinergis dan tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi (khususnya pakar PAUD) dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk **memperbaiki budi pekerti** peserta didik (Victor Purba, Kompas, Kamis, 22 Maret 2007; 12).

Jadi nilai budi pekerti dibawa seorang guru yang meyakini kebenaran budi pekerti sebagai ideologi ideal dan harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) khususnya anak usia dini agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang menjunjung nilai-nilai budi pekerti dapat terwujud.

Dengan adanya benih nilai-nilai **budi pekerti** yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai budi pekerti dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai budi pekerti yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi anak-anak usia dini untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan budi pekerti dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*. Apalagi guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dengan konsep *“Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani”*.

Penutup

Pendidikan budi pekerti akan berhasil apabila, guru memberi stimulus agar anak didik memberi respon sesuai dengan keinginan pendidik, dan dengan stimulus, respon itu anak didik diberi *classical conditioning* untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Agar tujuan pendidikan budi pekerti dapat tercapai, guru dapat memberi hadiah kepada anak didik yang berhasil dan hukuman bagi yang gagal, namun dalam koridor memanusiakan manusia. Proses stimulus dan respon dalam pendidikan budi pekerti harus diberikan terus menerus dan terprogram, sehingga anak usia dini akan

memiliki *habitus* (pendidikan yang merubah perilaku) dalam mewujudkan Indonesia baru.

Dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti untuk mewujudkan Indonesia baru, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas peserta didik untuk membuat mereka sadar akan keberadaannya di dunia ini. Prinsip humanisme harus dijunjung secara otentik, bukan humanitarian. Prinsip humanisme yang ada dalam UU Sisdiknas adalah untuk mencapai manusia bermoral, bermartabat, berbudi pekerti luhur. Sedang untuk melaksanakannya secara kritis, dialogis dan menghindari kekerasan dan mengedepankan nilai-nilai budi pekerti yang luhur.

Pendidikan budi pekerti diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial, aturan hukum dan nilai-nilai budi pekerti demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai budi pekerti dan moral bangsa.

Arah kebijaksanaan pendidikan budi pekerti adalah untuk mewujudkan masyarakat sipil dengan parameter masyarakat lebih baik; demokratis, anti kekerasan, berbudi pekerti luhur, bermoral; masyarakat mendapat porsi partisipasi lebih luas, serta adanya landasan kepastian hukum, mengedepankan nilai-nilai egalitarian, nilai keadilan, menghargai HAM, penegakan hukum, menghargai perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dengan dilandasi pengamalan nilai-nilai moral Pancasila, yang diaktualisasikan baik secara obyektif dan obyektif sebagai paradigmanya. Budi pekerti luhur harus menjadi bagian hidup dalam kehidupan sehari-hari akan sangat mendukung suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan budi pekerti dan mewujudkan Indonesia baru yang lebih ideal (*Beautiful Cauntry* artinya negeri yang indah, tanpa kekerasan, dan masyarakatnya hidup dalam kedamaian, ***gemah ripah loh jinawi, tata tertrem karta raharjo***, dalam koridor *Civil Society*)

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, dkk. *Pendekatan dan Metode Pengembangan Moral Anak Usia Dini*. Yogyakarta; FIP UNY. (makalah).

Budi Istanto, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus*. Yogyakarta: FIP. UNY.

Habibah, dkk. 2007. *Metode Pengembangan Moral Anak Pra Sekolah*. Yogyakarta: FIP UNY. (makalah).

Hendrowibow, I. 2007. "Pendidikan Moral", Majalah *Dinamika*, FIP, UNY.

LAI, 2003, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Kaelan, 2001. *Pendidikan Moral Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Parjono. 2005. *Pendidikan Nilai-nilai Moral*. Yogyakarta: MKU, UNY.

Romi Toufiqoh, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral*, Yogyakarta: FBS, UNY.

Slamet Suyanto, 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdikbud, Dirjendikti. Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi.

-----, 2006. "Prinsip Pembelajaran Anak Usia Dini", *Disampaikan pada Saresehan Pengembangan Pembelajaran di SD dan TK Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar FIP*. Puslit PAUD UNY.

Setyo Raharjo, 2005. *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: FIP, UNY.

Sofia Hartati. 2005. *Perekembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Dirjendikti Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

Sri Rumini, dkk. 1995. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sunarso, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegara*, Yogyakarta: UPT MKU UNY

Umar Said, 2007. *Google Pendidikan Moral*.

Surat Kabar

Hamengkubuwono X, "Budi Pekerti Masuk Muatan Lokal", *Kompas*, 15 Maret 2007.

Haedhar Nashir, "Leptop Dewan". *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 23 Maret 2007.

Purnomo, "IPDN Bukan Pusat Pelatihan Binatang", *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2007.

Redaktor, "Tajuk Rencana", *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2007.

Victor Purba, "UI Siap Melangkah Lebih Kongkrit", *Kompas*, Jakarta, 23 Maret 2007

PENTINGNYA PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BAGI ANAK USIA DINI



Oleh::

H. AM. Yusuf, M.Pd.

**Makalah ini dibuat Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat di TK
INDRIASANA Maguwoharjo, Depok, Sleman**

Maret 2008

**SURAT TELAH MELAKSANAKAN TUGAS
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor:

Dengan Surat ini kami Kepala Sekolah SD Negeri Deresan, Sleman, Yogyakarta:

Nama : Drs. Jumari
NIP. : 131 516 160
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Deresan, Sleman, Yogyakarta

Menerangkan bahwa Tim Dosen dari FIP UNY telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan Tema “Pendidikan Multikultural” dengan baik. Adapun Dosen yang kami maksudkan adalah:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Si. | NIP. 131 655 977 |
| 2. H. Sujati, M.Pd. | NIP. 131 353 368 |
| 3. Aprillia Tina Lidyasari | NIP. 132 309 077 |

Demikianlah surat keterangan kami, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2006.

Kepala Sekolah SDN Deresan,

Drs. Jumari
NIP. 131516160